IMPLEMENTATION OF KPH POLICIES WITHIN INDIGENOUS AGROFORESTRY SYSTEMS OF BURU ISLAND, MOLUCCAS

Iskar Bone¹⁾, Agus Kastanya¹⁾, Marthina Tjoa¹⁾, Hendrik H.E.S Aponno¹⁾,
Ida Aju Resosudarmo²⁾ Nugroho Adi Utomo²⁾

Email : aguskastanya@yahoo.com

¹⁾Department of Forestry, Faculty of Agricultural, Pattimura University Ambon, Indonesia

²⁾Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia

ABSTRACT

For centuries, many indigenous peoples across the archipelago have adopted customary agroforestry practices that are evidently sustainable. Forest Management Units (FMUs) or KPHs, intended to improve forest management at the ground level therefore, need to adopt policies that can align with, complement and strengthen existing local land-use systems. The purpose of this research is to gain an understanding on how KPH policies, those with direct implications on the ground, can be aligned with indigenous peoples' traditional agroforestry systems of Buru. We used a qualitative descriptive approach based on in-depth interviews with key informants and focus group discussions with indigenous groups of Buru.

Results show that the indigenous peoples of Buru have and continue to follow a set of norms and rules in their forest land management practices: lands are utilized to plant various agricultural commodities that are combined with forest species which are left to grow naturally upon clearing land for agriculture or in establishing gardens. There are also norms and rules in establishing fields and gardens, starting from clearing of the land, to maintenance, to harvest. Every family in villages own fields and gardens, making them a vital part of community life. KPH policy of land use at the site level requires an understanding of how rules of resource use can be made compatible with and support community needs. In the operationalization of KPH, indigenous peoples' rights to regulate the use of forest land, access to forest land use, and use of forest products need to be accommodated so that these communities continue to benefit from activities on their land.

Keywords : KPH, customary agroforestry systems, Indigenous people

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Praktek pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat adat telah menciptakan sejarah penguasaan lahan hutan oleh masyarakat yang secara harmonis telah dibangun dalam mengelola kelestarian sumberdaya hutan. Pengelolaan hutan secara lestari berdasarkan kearifan adat, telah mengatur pemanfaatan yang terus menerus bagi generasi berikutnya. Pengelolaan hutan masyarakat adat berdasarkan aturan, nilai-nilai dan norma yang berlaku secara turun temurun telah memperkuat hak atas sumberdaya hutan. Pengelolaan hutan meliputi pembukaan hutan untuk usaha perladangan dan pertanian lainnya, penggembalaan ternak, perburuan satwa liar dan pemungutan hasil hutan telah dilakukan secara berkelanjutan (Suharjito dkk, 2000).

Keberadaan berbagai praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat di Indonesia dikenal dengan berbagai istilah seperti perladangan berpindah yang berkembang menjadi dusung di Maluku, mamar di Nusa Tenggara Timur, lembo pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, tembawang pada masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, repong pada masyarakat Peminggir di Lampung, dan tombak pada masyarakat Batak di Tapanuli Utara. Praktek tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat turun temurun telah dan mampu mengelola sumber daya alam termasuk hutan secara lestari. Pola-pola ini memiliki sistem yang sangat terkait dengan pengelolaan hutan alam, hutan tanaman, kebun dan usaha pertanian sehingga bentuknya sangat beragam, dinamis, terpadu yang menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, baik secara ekonomi, sosial budaya, religi, dan ekologi (Suharjito dkk, 2000).

Praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat di Maluku yang lebih dikenal dengan “Dusung” yaitu sistem berkebun dengan kombinasi tanaman pertanian diantara tanaman hutan telah mengategorikan dusung sebagai sistem agroforestry tradisional. Hairiah, dkk (2004) menjelaskan bahwa sistem agroforestry merupakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang dinamis dan berbasis ekologi, dengan mamadukan berbagai jenis pohon pada tingkat lahan (petak) pertanian maupun pada suatu bentang lahan (*lansekap*). Pengolahan lahan dengan sistem agroforestry bertujuan untuk mempertahankan jumlah dan keragaman produksi lahan, sehingga berpotensi memberikan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan bagi para pengguna lahan.

Dusung telah berkembang berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing kelompok masyarakat adat. Sistem dusung yang dikembangkan pada masing-masing wilayah di Maluku berbeda dalam teknik dan pengelolaannya. Hal ini menunjukkan adanya keragaman nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang dapat dijadikan pembelajaran dalam sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat.

Keberlanjutan praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat yang telah dilakukan sampai saat ini menjadi bukti bahwa masyarakat adat dengan nilai-nilai dan aturan yang disepakati secara bersama memiliki kekuatan secara adat untuk dilaksanakan dan diperhatikan oleh kelompok masyarakat tertentu. Kepatuhan terhadap nilai-nilai dan aturan adat mendorong

masyarakat untuk mempertahankan keharmonisan hidup antar masyarakat maupun masyarakat dengan alam lingkungannya.

Pengelolaan hutan di Indonesia berdasarkan aturan dan kebijakan pemerintah, sampai saat ini telah mengalami perubahan dan penyesuaian yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun untuk menjaga kelestarian hutan. Pada sisi lain berbagai kebijakan untuk pengelolaan hutan bersama masyarakat tidak sedikit yang telah menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara masyarakat dan pihak swasta yang diberikan ijin oleh pemerintah untuk mengelola hutan.

Saat ini Pemerintah telah menetapkan unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak sebagai dasar sistem tata kelola kehutanan yang sesuai untuk mencapai kelestarian dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kehutanan (sekarang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK) mendefinisikan KPH sebagai wilayah pengelolaan hutan yang sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efektif, efisien dan lestari. Filosofi dibangunnya KPH adalah pengelolaan hutan di tingkat tapak, karena munculnya permasalahan kehutanan akibat ketiadaan pengelola di tingkat tapak, sehingga hutan dipandang oleh masyarakat sebagai kawasan open access. Keberadaan KPH diharapkan dapat memecahkan permasalahan kehutanan terkait dengan pengelolaan hutan di tingkat tapak, akses masyarakat, pelestarian hutan dan permasalahan sosial terkait tenurial (Kementerian Kehutanan, 2011). KPH menyelenggarakan penguasaan sumberdaya hutan itu bukan dalam arti memberi ijin pemanfaatan hutan melainkan melakukan pengelolaan hutan sehari-hari (Kartodihardjo, 2001).

Penetapan areal KPH terdapat pada semua fungsi hutan antara lain HP, HL, HK. Pada sisi lain, hutan adat berada di semua fungsi kawasan hutan bahkan di hutan-hutan yang telah diberi izin secara resmi oleh pemerintah (Kartodihardjo, 2013). Kondisi ini menunjukkan terdapat tumpang tindih antara hak adat dan akses terhadap lahan hutan yang sama. Hak dan akses pada lahan yang statusnya telah ditetapkan pemerintah biasanya akan kuat pada pihak yang memiliki bukti legal (biasanya pemerintah dan perusahaan) sedangkan masyarakat adat seringkali termasuk pihak yang lemah karena klaim atas lahan hutan tersebut dianggap tidak legal, paling tidak membutuhkan proses yang berbelit-belit, sehingga hak-haknya sering diabaikan. Lemahnya penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan bukan hanya pada tataran operasional melainkan tekanan dalam norma, pemaknaan dan landasan berfikir dalam pengelolaan hutan (Kartodihardjo, 2013). “pembuktian diri” bagi masyarakat adat dalam penguasaan mereka atas hutan adat harus dapat dipakai untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat adat dan kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan yang berkelanjutan (Cahyadi, 2013). Harus dapat dibuktikan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang memandang manusia sebagai bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni dengan alam (Nababan, 2008).

Sistem agroforestry secara tradisional yang terdapat di Pulau Buru, telah diimplementasikan pada berbagai lahan yang akan diimplementasikan dengan program KPH. Untuk itu kajian ini akan menjawab permasalahan tentang bagaimana sistem pemanfaatan lahan yang telah berkembang secara turun temurun oleh masyarakat adat dapat dipahami dalam rangka

implementasi KPH yang meliputi wilayah kelola masyarakat adat pada berbagai fungsi kawasan hutan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun kesepahaman tentang implementasi kebijakan KPH dan sistem agroforestry tradisional masyarakat adat Pulau Buru.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pikir Penelitian

Pada saat ini, terdapat hasil rancang bangun 600 KPH pada hutan produksi (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP) dan lindung (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau KPHL) di seluruh Indonesia yang tersebar pada semua provinsi (Renstra KLHK, 2015). Di Provinsi Maluku terdapat 22 unit KPH (17 unit KPHP dan 5 unit KPHL). Di Pulau Buru sebagai daerah kajian terdapat 3 KPH (KPHP Wae Apu, KPHP Wae Tina, dan KPHP Wae Mala) yang tersebar pada 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan (Pemerintah Provinsi Maluku, 2009; Kementerian Kehutanan, 2010). KPHP Wae Apu dan KPHP Wae Tina sudah ditetapkan, masing-masing dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 770/SK-Menhut/2012 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 977/SK-Menhut/2013. Sedangkan KPHP Wae Mala masih dalam tahap perencanaan

KPH sebagai sistem pengelolaan hutan di tingkat tapak berhubungan langsung dengan masyarakat yang mendiami areal hutan. Implementasi KPH dalam bekerjasama dengan masyarakat sekitar unit pengelolaan KPH menjadi tantangan baik bagi masyarakat sendiri maupun pihak KPH.

Terdapat perbedaan konsep pengelolaan hutan bagi masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar hutan yang pada umumnya memiliki aturan, nilai dan norma yang berlaku secara adat dalam mengelola sumberdaya hutan dan lingkungan. Sedangkan KPH memiliki konsep yang lebih bersifat normative berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya diperkenalkan kepada masyarakat. Diharapkan bahwa konsep KPH yang ditawarkan dapat diterima oleh masyarakat. Pada sisi lain masyarakat dengan sistem adat yang berjalan sejak turun temurun menjadi suatu perilaku hidup yang mempengaruhinya dalam melakukan seluruh aktifitas pengelolaan hutan, juga mengharapkan adanya pemahaman dari pihak KPH. Kepentingan keduanya dalam pengelolaan hutan memiliki sasaran yang sama yaitu kelestarian hutan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Tantangan keberadaan masyarakat adat, selain persoalan hukum yang mendukung masyarakat adat, sering juga dipertanyakan tentang kapasitas masyarakat adat dalam mengelola lahan dan sumberdaya hutan. Hal tersebut menjadi tantangan “pembuktian diri” bagi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Sehingga dalam bekerjasama dengan pihak lain akan terdapat sinergitas dan keharmonisan untuk mencapai tujuan bersama.

Pendekatan dan Proses Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatian pada permasalahan tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Irawan (2007) menyatakan bahwa kebenaran yang dibangun dalam penelitian kualitatif adalah kebenaran intersubjektif yaitu kebenaran yang dibangun dari hubungan faktor yang bekerja bersama-sama, dimana fakta yang ditemukan tidak bebas dari interpretasi apapun, tetapi harus dipersepsikan sesuai konteks yang terjadi dalam interaksi sosial masyarakat. Selanjutnya dikatakan Suharjito (2014) istilah kualitatif pada pendekatan kualitatif tidak menunjuk pada penggunaan data kualitatif saja, namun memungkinkan juga bagi penelitian kualitatif untuk menggunakan data kuantitatif.

Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder berupa data-data penunjang lainnya dikumpulkan melalui penelaahan pustaka, laporan, dan berbagai kebijakan yang terkait dengan hak masyarakat adat dan KPH. Untuk memperoleh data tersebut maka metode pengumpulan data dilakukan dalam beberapa cara antara lain:

- Wawancara mendalam dengan informan kunci. Informan kunci adalah orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang isu-isu tertentu. Informan kunci termasuk kepala desa, raja petuanan (ada 8 raja petuanan di Pulau Buru), pemimpin tradisional atau kepala marga dan pihak KPH.
- Diskusi kelompok terfokus. bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam tentang konsep, persepsi dan gagasan sekelompok orang.
- Studi literatur, dilakukan dengan mengkaji publikasi, laporan, dokumen, peraturan perundangan dan lain-lain, yang berkaitan dengan permasalahan tenurial lahan hutan masyarakat adat dan KPH

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014). Aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian (display) data, verifikasi dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan KPH dan Implementasi di Tingkat Masyarakat

Landasan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) didasarkan beberapa peraturan perundangan diantaranya Undang - undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, PP Nomor 6 Tahun 2007 *jo* PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH dan Peraturan Menteri Kehutanan P.9/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) tentang Pengelolaan Hutan Pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP). Berdasarkan peraturan perundangan tersebut dijelaskan pokok-pokok kandungan yang isinya menjadi pilar kebijakan pembentukan KPH. KPH sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, dikelola secara efisien dan lestari. Kebijakan pembangunan KPH menjadi bagian dari penyediaan kepentingan publik dalam penyelenggaraan kehutanan.

Dalam konteks Maluku, dimana seluruh kawasan hutan Provinsi Maluku terbagi dalam KPH yang menjadi bagian dari Sistem Pengurusan Hutan Nasional, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Administrasi pemerintahan wilayah Maluku terbagi dalam 11 wilayah kabupaten/kota yaitu Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan. Luas seluruh wilayah daratan Maluku adalah 54.185 Km² dan lautan seluas 527.191 Km². Wilayah administratif pemerintahan Kabupaten/Kota memberi batasan pada kewenangan dalam pengelolaan hutan disamping status fungsi kawasan hutan sesuai peta penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Maluku. Pembagian wilayah kelola KPH berdasarkan kajian kelayakan ekologis, kepastian wilayah kelola, kelayakan kelembagaan dan pemanfaatan hutan diperoleh 22 KPH, terdiri dari 17 KPHP dan 5 KPHL yang terbagi pada 11 kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.66/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Maluku. Pencermatan terhadap status kawasan hutan, dapat diketahui arah pengelolaan hutan meliputi KPHP maupun KPHL. Begitu juga dengan wilayah kajian dalam penelitian ini berada pada Kabupaten Buru yaitu KPHP Wae Apu (Unit II) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 770/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan KPHP Wae Tina di Kabupaten Buru Selatan dan Buru yang merupakan KPHP Lintas dan) dibentuk berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 977/Menhut-II/2013 tertanggal 27 Desember 2013.

Kebijakan pembangunan KPH dianggap merupakan solusi yang efektif dalam melakukan perlindungan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. Pengelolaan hutan produksi yang selama ini dikelola berbasiskan ijin, ternyata tidak dapat memberikan jaminan terhadap kelestarian sumberdaya hutan. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan hutan diperlukan pembentukan

wilayah pengelolaan hutan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Unit pengelolaan. Kegiatan pengelolaan hutan meliputi (1) Tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, (2) Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, (3) Rehabilitasi dan reklamasi hutan dan (4) Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Terkait dengan implementasi kebijakan KPH di tingkat masyarakat tidak terlepas dari akses dan keberadaan masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Dimana akses masyarakat dapat terdiri dari berbagai bentuk dan tipologi sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat, sejarah interaksi masyarakat dengan hutan dan harapan ekonomi masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya. Apabila dikaitkan dengan ijin atau penetapan status kawasan hutan, maka akses masyarakat yang dimaksud tidak dapat ditetapkan pada tingkat KPH karena kewenangan berada di tangan Pemerintah atau pemerintah Daerah. Untuk itu, keberadaan KPH memungkinkan identifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumberdaya hutan dengan lebih jelas dan cermat, sehingga proses-proses pengakuan hak, ijin maupun kolaborasi menjadi lebih mungkin dilakukan. Begitu juga masalah penyelesaian konflik maupun pencegahan terjadinya konflik lebih dapat dikendalikan. Selain itu, KPH dapat memfasilitasi komunikasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk menata hak dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan (Dirjen Planologi, 2011).

Eksistensi Masyarakat Adat

Eksistensi masyarakat adat di Maluku telah mendapat pengakuan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang "Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku". Persyaratan tentang keberadaan masyarakat adat yang terdapat dalam UU dan peraturan, menurut Sumardjono (2009), tidak perlu dipenuhi secara kumulatif, hal itu merupakan petunjuk bahwa hak adat atas tanah dan sumberdaya alam di kalangan masyarakat adat tersebut masih ada. Kriteria ini diharapkan bukan menjadi pembatas suatu komunitas masyarakat adat, tetapi membantu para pengambil keputusan untuk menerima keberadaan suatu masyarakat adat. Masyarakat adat yang mendiami desa-desa di wilayah kajian secara keseluruhan memiliki sistem kekerabatan/ kemasyarakatan yang berlandaskan adat-istiadat dan merupakan unsur-unsur pokok yang diwarisi secara turun temurun.

Struktur dan bentuk atau sistem kemasyarakatan pada desa-desa di lokasi penelitian memiliki beberapa bentuk kesatuan kemasyarakatan, antara lain *keluarga* yaitu Struktur masyarakat terkecil yang terdiri dari bapak, ibu dan anak; *mata rumah* yaitu kumpulan beberapa keluarga yang memiliki hubungan genealogis; *marga* yaitu kumpulan beberapa mata rumah yang membentuk satu marga; *soa* yaitu kelompok marga yang terdiri dari mata rumah yang sama; *desa* yaitu kelompok masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan yang memiliki aturan dan norma yang menempati suatu lokasi tertentu secara bersama maupun dengan masyarakat lain yang saat ini telah menempati wilayah mereka; *petuanan* yaitu Kelompok

kekerabatan yang lebih luas meliputi kumpulan marga dan soa pada beberapa desa adat yang membentuk satu petuanan.

Kekuasaan pemerintahan di desa-desa di Pulau Buru dipimpin oleh kepala desa dan dalam struktur kelembagaan petuanan (*Regentschap*) dipimpin oleh Raja yang membawahi beberapa desa-desa dalam satu wilayah petuanan. Terdapat kelembagaan yang lebih tinggi yaitu Latupati yang dibagi atas 2 yaitu Latupati Buru dan Buru Selatan. Latupati Buru Utara terdiri dari Raja Kayeli (Ketua Latupati), Lesiela, Tagalisa dan Liliali. Sedangkan Buru Selatan terdiri dari Raja Masarete (Ketua Latupati), Waesama, Ambalau dan Fogi.

Struktur kelembagaan 6 petuanan yang dapat diwawancarai membentuk satu struktur yang meliputi semua komponen adat dalam setiap petuanan. Terdapat beberapa perangkat adat yang tidak terdapat pada petuanan lain seperti seget natan, matgugul, portelu, kaksodin hanya ada di Petuanan Leisela, kecuali Kaksodin hanya ada di Kayeli, tetapi raja, kepala soa, marinyo terdapat di semua petuanan. Sedangkan istilah tuan guru hanya ada di Ambalau, dan perangkat saniri ada pada semua petuanan kecuali Ambalau. Istilah tua adat, porwusi dan kawasan ada pada sebagian petuanan.

Wilayah adat di Pulau Buru diistilahkan dengan Petuanan/*Regentschap*. Satu petuanan meliputi gabungan beberapa wilayah administrasi desa atau kecamatan dan kepemilikan atas setiap wilayah terdiri dari kepemilikan marga-marga asli yang menempati desa-desa tersebut. Masing-masing Soa memiliki lahan marga/soa tersendiri, namun pemanfaatan hasil hutan dapat dilakukan di luar lahan yang menjadi hak miliknya, yang diistilahkan dengan “tampa makan bersama”.

Wilayah dan batas *Regentschap* yang dibuat pada jaman Belanda dan perubahannya (hasil klarifikasi dengan beberapa Raja Petuanan) dapat dilihat pada Gambar 1. dibawah ini.

Gambar 1. Peta Regentschap dan Wilayah Administrasi Pulau Buru
(Hasil Klarifikasi dengan Beberapa Raja Petuanan, 2016)

Pemanfaatan Lahan dengan Sistem Agroforestry

Masyarakat Pulau Buru membagi ruang Pulau Buru atas tiga bagian *pertama*, kawasan yang dilindungi karena nilai kekeramatan, wilayah ini termasuk gunung Date, danau Rana, dan tempat keramat di hutan primer. *Kedua*, kawasan yang diusahakan meliputi pemukiman, kebun, hutan berburu atau meramu dan hutan kayu putih. *Ketiga*, kawasan yang tidak diusahakan meliputi bekas kebun dan padang alang-alang (Pattinama, 2008)

Dalam melakukan berbagai aktifitas mata pencaharian, dengan teknologi tradisional, mereka menuruti berbagai kebiasaan dan adat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Beberapa sistem adat terkait pengelolaan lahan secara tradisional oleh masyarakat adat Pulau Buru untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari adalah berkebun.

Masyarakat adat Pulau Buru menyebut kebun dengan nama *hawa*. Kebun biasanya diusahakan secara berkelompok. Kelompok-kelompok terdiri dari beberapa keluarga yang lazimnya mempunyai hubungan kerabat. Sistem berkebun masih berpindah-pindah dengan rotasi dari 3 sampai 4 tahun. Sebuah kebun akan ditinggalkan setelah diolah selama jangka waktu 3 tahun. Setelah ditinggalkan selama 3 atau 4 tahun, tempat bekas kebun (*wasi*) dapat dibuka kembali untuk kebun baru. Mengenai kebun (*hawa*), dikenal berbagai istilah untuk mengidentifikasi kebun (Huliselan dkk, 1988; Pattinama, 2012) :

- 1) **Hawa Fehut** (*fehut* = baru, *hawa fehut* = kebun baru) yaitu kebun baru diusahakan dan telah di tanami tetapi hasil pertaniannya belum dipungut. Jadi istilah *hawa fehut* digunakan sejak sebidang tanah mulai diusahakan yakni dari penebangan, pembersihan sisa tebangan dan penanaman sampai pada saat panen pertama.
- 2) **Hawa** adalah kebun yang hasilnya sementara dipungut. Jadi sejak panen pertama tidak lagi digunakan nama *hawa fehut*, tetapi digunakan nama *hawa*. Istilah *hawa* ini juga biasanya digunakan untuk kebun pada umumnya. Dikenal umpamanya *hawa hala* (kebun padi), *hawa magat* (kebun petatas) dan *hawa mangkao* (kebun ketela).
- 3) **Hawa wasi** yaitu istilah yang digunakan untuk kebun yang hasilnya telah diambil beberapa tahun dan hampir ditinggalkan. Biasanya karena hasilnya sudah berkurang maka kebun tersebut tidak dirawat, tetapi sisa-sisa hasilnya masih diambil antara lain pisang, nenas dan lain-lain.
- 4) **Wasi** yakni istilah yang digunakan untuk tanah kebun yang dimanfaatkan kembali

Pada lahan *wasi* masih terdapat tanaman umur panjang, dimana buah/hasilnya masih diambil antara lain Nangka, Cempedak, Mangga dan lain-lain. Setelah satu *wasi* ditinggalkan selama 3 hingga 4 tahun, dapat dibuka kembali sebagai kebun baru. Kebun baru yang dibuka di bekas kebun ini disebut *nogit hawa*. (*Nogit* = menebang pohon dalam ukuran sedang).

Wasi adalah kebun yang benar-benar akan ditinggalkan yang disebut juga *was-wasi* hingga tumbuh pohon hutan lainnya. Tanaman lainnya adalah Nakan (Nangka = *Arthocarpus integrifolia*), Nakan Dengen atau Cempedak (*Arthocarpus champeden*), Waplane atau Mangga

(*Mangifera indica* L), Hosi roit atau jeruk (*Citrus nobilis* Lour), hosi hat (*Citrus grandis* L) Osbeck), Kopi (*Coffea* sp), Warian (*Durio Zibethinus*, Murr), Biafolo (*Arenga pinnata*), Pala (*Myristica fragrans* Houtt), dan Cengkeh (*Eugenia aromatica* O.K.). Setelah wasi lahan dibiarkan selama 8-9 tahun. Areal ini selanjutnya disebut *wasilalen*. Di Pulau Buru dalam *Wasilalen* terdapat sekitar 10 jenis tanaman (Pattinama, 2012).

Usaha membuka areal hutan primer untuk kebun biasanya disertai berbagai acara adat yang biasa dilakukan sebelum tahap kegiatan tersebut dimulai. Adat kebun menyangkut beberapa kegiatan upacara adat yang bertalian dengan proses pengusahaan kebun, yang dimulai dari usaha pemilihan/pemilikan areal hutan/tanah, sampai pungutan hasil (panen).

1. Adat *Sihit*

Sihit dalam bahasa Buru menunjukkan satu larangan untuk melindungi hak milik tetap maupun sementara baik perorangan maupun kelompok dari pengambil alihan oleh orang lain. *Sihit* bisa dibuat untuk hutan primer hutan buruan, dusung damar, tanaman dikebun dan lain-lain. Wujud *sihit* adalah suatu tanda yang disebut *eslelet*. *Eslelet* biasanya dibentuk dari daun tumbuhan yang diambil dari tumbuhan yang dominan dalam areal hutan atau kebun yang akan dilakukan *sihit*. Cara lain adalah menyisipkan daun tersebut pada sebuah pohon yang menandai sudut kebun dengan cara mengeluarkan sedikit kulitnya. Ujung daun sebagai petunjuk arah, diarahkan ke areal yang dipilih. Dapatlah dikatakan bahwa fungsi *eslelet* itu adalah sebagai tanda larangan, sebagai petunjuk arah ujung daun orang yang telah mengetahui daerah/areal hutan mana yang telah dipilih.

2. Adat *Latak/Tahak*

Tahap berikut dalam aktifitas pembukaan hutan untuk kebun baru adalah penebasan dan pemotongan semak-semak dan penebangan pohon. Menjelang pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, biasanya dilakukan acara adat yang disebut *latak/tahak*. Upacara ini diadakan karena menurut kepercayaan orang-orang Buru pada setiap pohon (terutama pohon-pohon besar) yang ada dalam hutan primer biasanya terdapat penghuninya atau penunggu berupa roh-roh atau makhluk halus. Untuk itulah, maka apabila pohon-pohon tersebut akan ditebang, perlu dibuat suatu acara yang bertujuan memohon izin dari para penunggu (roh-roh) tersebut.

Pembukaan kebun baru dapat dilakukan di bekas kebun yang telah menghutan kembali (*wasi*) setelah ditinggalkan 3-4 tahun (*wasi*). Dalam hal ini, anggota kelompok dapat kembali ke bekas kebunnya, karena masih terdapat tanaman-tanaman umur panjang mereka yang selalu ditandai dan diambil hasilnya, seperti Nangka, Cempedak, Mangga dan lain-lain. Akan tetapi seseorang baik anggota kelompok maupun tidak dapat memilih bekas kebun orang lain, tetapi dengan syarat harus menyerahkan 4 jenis barang sebagai tebusan. Barang-barang itu bisa berupa kapak, parang, tombak dan kain putih (benda yang biasanya dipertukarkan). Dalam usaha membuka bekas kebun ini, tidak dilaksanakan acara-acara seperti pada pembukaan hutan primer.

3. Adat Bakar (*Sigi Rahe*)

Selesai penebangan, maka kegiatan berikutnya adalah penjemuran. Waktu yang dibutuhkan untuk menjemur, berkisar antara 1-1½ bulan (sekitar bulan September dan Oktober). Apabila daun-daun dan ranting menjadi kering maka tiba saatnya untuk dibakar (bakar = *sigi*). Bagi orang asli Buru membakar kebun baru juga didahului oleh acara adat. Acara adat ini bertujuan agar api pada kebun yang dibakar tidak akan melewati batas-batas yang ditentukan. Hakekat dari pada acara ini adalah perlindungan terhadap tanah dan hutan mereka yang dianggap suci dan keramat. Acara tersebut adalah acara penyiraman batas-batas kebun dengan air.

Air ini diambil dengan menggunakan 5 potong bambu (*uka*) dari jenis tertentu (*luleba*) yang terdiri dari masing-masing 1 ruas (*uka* adalah sejenis bambu ukuran kecil dengan garis tengahnya sekitar 2-3 cm). sebelum menimba air dengan menggunakan 5 ruas/potong bambu tersebut pimpinan upacara mengucapkan *saruk* (dengan menyebut sumber air terkenal) yang kata-katanya (*esnaru*) sebagai berikut : “*Akoi Wae Nibe, Atofa bo hawa* (saya timba air Wae Nibe, saya siram keliling kebun)”.

4. Adat Menanam (*Sekak*)

Penanaman akan dimulai setelah tiap anggota marga mendapat bagian tanahnya. Penanaman dilakukan oleh masing-masing keluarga. Pada masyarakat asli Buru, penanaman awal biasanya dengan menanam tanaman Hotom (Fetem), kecuali Padi ladang biasanya ditanam pada areal tersendiri.

Pada kebun tanaman campuran setelah ditanam Hotom, selanjutnya akan ditanam tanaman pertanian lainnya seperti jagung, kacang, ubi kayu, dan jenis umbi-umbian lainnya. Bagi masyarakat Buru, Hotom dan Padi (Hala), merupakan dua jenis tanaman utama, sehingga untuk penanaman didahului dengan upacara adat.

Teknik penanaman kedua jenis tanaman utama berbeda, Hotom ditanam dengan cara menghamburkan bibit di atas tanah, sedangkan padi dimasukan dalam lubang-lubang yang telah dibuat dengan sebatang tongkat.

5. Adat Panen (*Egu*)

Pemanenan hasil kebun berupa padi dan hotom didahului upacara adat yang dikenal dengan upacara *egu hala* (panen padi) dan *egu fetem* (panen hotom). Aktivitas pemanenan hasil oleh masyarakat adat Buru biasanya dirahasiakan, dengan pertimbangan jangan sampai ada yang menghambat misalnya terjadi hujan besar atau pemilik kebun jatuh sakit.

Pada hari pemanenan semua anggota marga telah berada di kebun. Kegiatan didahului dengan pemasangan eslelet pada 4 sudut kebun oleh ketua kelompok. Setelah memasang eslelet ketua kelompok melakukan pemetikan pertama dengan mengucapkan kata memohon pertolongan agar panen berjalan lancar, selanjutnya semua anggota diperbolehkan untuk panen.

6. Adat *Tema*

Tema merupakan adat jamuan makan bersama setelah acara terakhir dari rangkaian acara-acara adat yang berkaitan dengan kegiatan berkebun untuk satu kampung. Acara *tema* bertujuan menyampaikan terimakasih atas perolehan hasil kebun. Ucapan terimakasih ini disampaikan kepada Tuhan (*Opo Lastatala*), orang tua-tua (*rom tuan*) dan penghuni tempat dimana kebun itu dibuka. Acara tema ini biasanya dilaksanakan setelah panen padi dan hotom.

Aturan dalam Sistem pemanfaatan lahan masyarakat adat Buru

Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah Petuanan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lokal masyarakat desa, namun bagi masyarakat luar pemanfaatan harus berdasarkan ijin. Sumberdaya hutan yang boleh dimanfaatkan adalah hasil hutan kayu dan non kayu seperti rotan, damar, bambu, hewan, obat-obatan, sumberdaya air dan bahan tambang lainnya. Pemanfaatan lahan oleh orang luar berdasarkan ijin pemilik lahan dan diketahui oleh Raja Petuanan.

Lahan milik marga-marga dalam wilayah petuanan diatur oleh masing-masing soa. lahan milik marga dapat dijual atau dikontrak tergantung kesepakatan marga. Jika lahan yang akan dijual kurang dari 2 Ha, biasanya diurus dalam kelompok marga yang bersangkutan saja, tetapi jika lebih, misalnya kepada perusahaan logging, maka aturannya harus melalui, diketahui oleh, dan seijin raja karena menyangkut batas hak pemilikan dengan marga lainnya. Sebagai contoh, misalnya ijin pemanfaatan kayu bagi PT Nusa Padma Corporation, para tokoh adat dan marga-marga pemilik lahan dimana eksploitasi kayu itu akan dilakukan, mereka rapat bersama dan membuat kesepakatan dengan perusahaan dari 2007 sampai 2017. Sebagai hasilnya diputuskan mengenai insentif/sistem pembagian hasil produksi kayu (kubikasi) – dalam hal ini 20 ribu rupiah per kubik. Semua tokoh-tokoh marga yang memiliki lahan tersebut menandatangani surat pelepasan hak pemanfaatan lahan kepada perusahaan. Pada prinsipnya, isinya adalah bentuk persetujuan marga-marga tersebut bahwa lahan itu boleh dimanfaatkan oleh perusahaan, tetapi masih bisa memanfaatkan lahan tersebut. Dalam hal ini raja ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan lahan untuk dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut, seperti halnya kepala desa.

Proses monitoring di wilayah petuanan dilaksanakan secara bersama – sama oleh masyarakat dan perangkat adat (kepala kawasan). Masyarakat yang dimaksudkan adalah pemilik lahan marga yang ada dalam petuanan tersebut karena tidak mungkin kepala kawasan mengawasi luasan yang terlalu besar. Lahan yang dimonitor hanya lahan yang mengikuti aturan adat.

Pelanggaran terhadap aturan adat yang diberlakukan pada wilayah petuanan akan mendapatkan sanksi secara adat yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Kesesuaian Sistem Adat dan Kebijakan KPH

Diperlukan kejelasan batas lahan secara fisik dan kejelasan hak-hak individu dalam pengelolaan lahan. Dengan kata lain, KPH perlu mengetahui dan mengakui batas fisik wilayah

pengelolaan masyarakat adat dan memahami serta mengakui hak-hak masyarakat serta mengintegrasikannya dalam operasionalisasi KPH.

Hasil kajian menunjukkan bahwa batas-batas wilayah adat (petuanan/marga) pada umumnya masih bersifat alami, dan setiap marga mengetahui batas-batas tersebut. Untuk itu dalam pengelolaan KPH perlu mempertimbangkan batas-batas alam yang menjadi klaim masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan pemetaan partisipatif lahan masyarakat untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam peta blok KPH yang telah ditetapkan.

Terkait dengan kejelasan hak atas lahan pada marga asli secara adat menjadi milik yang diwariskan secara turun temurun untuk dikelola. Namun di dalam sebagian wilayah petuanan di Pulau Buru sudah terdapat hak milik pendatang melalui proses jual beli yang dilakukan oleh marga asli. Bentuk integrasi ini lebih diarahkan pada bentuk hak yang akan menjadi bagian dari masyarakat adat maupun pendatang.

Hak masyarakat atas sumberdaya hutan sebagian sulit ditegakkan karena beberapa hak masyarakat tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Masyarakat lokal memahami bahwa mereka memiliki hak untuk memanfaatkan kayu untuk kebutuhan lokal, tetapi hak ini tidak diakui secara legal karena bertentangan dengan aturan formal pengelolaan hutan (pembatasan pemanfaatan kayu). Dalam operasionalisasi KPH, hak-hak mengatur pemanfaatan lahan hutan, akses terhadap pemanfaatan lahan hutan, serta penggunaan hasil pemanfaatan lahan hutan masyarakat adat perlu diakomodir sehingga masyarakat bisa memperoleh manfaat dari aktivitas di lahan mereka. Pendekatan yang dilakukan dapat diarahkan pada integrasi kepemilikan dan akses atas sumberdaya yang ada pada lahan milik masyarakat secara adat.

Indikator yang digunakan terhadap prinsip ini adalah keterkaitan aturan pada level operasional, level kolektif dan level konstitusional. Terdapat keterkaitan antara aturan pada level operasional dan level kolektif, namun tidak ditunjang oleh aturan konstitusional. Pengembangan aturan pada satu level, tanpa ditunjang aturan di level lain, akan menghasilkan sistem yang tidak sempurna sehingga aturan itu tidak dapat berjalan lama. Bentuk integrasi yang disarankan yaitu penyatuan aturan adat dan aturan KPH dalam pemanfaatan lahan yang didukung oleh aturan nasional.

KESIMPULAN

Eksistensi masyarakat adat di Pulau Buru menunjukkan adanya sistem-sistem adat yang masih diberlakukan dalam hubungan kemasyarakatan maupun dalam pengelolaan lahan hutan. Berfungsinya kelembagaan adat dengan pranata-pranata adat dengan sistem kearifan lokal dalam mengelola lahan hutan yang telah dibangun sejak leluhur membuktikan bahwa masyarakat masih tetap eksis untuk dikategorikan sebagai masyarakat adat. Wilayah adat menjadi bagian penguatan eksistensi masyarakat adat karena setiap sistem penguasaan lahan petuanan dapat ditentukan oleh setiap perangkat adat dan diketahui oleh masyarakat adat. Pembagian wilayah adat memiliki bukti-bukti yang kuat di lapangan maupun peta yang dihasilkan sejak jaman Belanda menjadi pegangan kuat bagi masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah adatnya. Sistem adat yang

telah dipegang kuat walaupun secara hukum tidak legal, namun pengabaian terhadap keberadaan masyarakat adat dengan hak-hak yang diklaim atas lahan tidak membantu penerapan program pembangunan masyarakat.

Penyesuaian sistem adat dalam implementasi program KPH pada lahan adat yang telah dikelola dengan sistem agroforestry tradisional di Pulau Buru sebaiknya menggunakan prinsip-prinsip kejelasan batas lahan secara fisik dan kejelasan hak-hak individu, integrasi kepemilikan dan akses atas sumberdaya yang ada pada lahan milik masyarakat secara adat dan penyatuan aturan adat dan aturan KPH dalam pemanfaatan lahan yang didukung oleh aturan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi. Erasmus, 2013. Kajian Putusan MK 35/PUU-X/2012. Respon Para Pihak dan Tantangan Penerapan Bagi Penguatan Hak Tenurial Masyarakat Adat atas Hutan Adat di Masa Depan. Warta Tenure, Edisi 11.
- Hairiah, K.D. *Suprayogo, dan M.V. Noordwijk. 2004. Ketebalan Serasah sebagai Indikator Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Sehat.* Word Agroforestry Center. Bogor.
- Irawan, P. 2007. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : DIA Fisip UI.
- Kartodiharjo, H. 2001. Pemerintah Perlu Memetakan Kembali Hutan Adat. Harian Media Indonesia, Sabtu 24 Pebruari 2001.
- Kartodiharjo, H. 2013. Kajian Putusan MK. 35/PUU-X/2012. Kelola Hutan Baru dengan Mindset dan Kepentingan Politik Lama. Warta Tenure Edisi 11.
- Kementerian Kehutanan. 2010, Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Maluku. SK. No. 66/Menhut-II/2010. Jakarta
- Kementerian Kehutanan. 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundang dan Implementasi. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2012. Pembentukan Wilayah Kelola KPHP Model Wae Apu. SK Menteri Kehutanan Nomor 770/SK-Menhut/2012. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2013. Pembentukan Wilayah Kelola KPHP Model Wae Tina. SK Menteri Kehutanan Nomor 977/SK-Menhut/2013. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. 2015. Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019. Jakarta.
- Nababan, A. 2008. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat : Antara Konsep dan Realitas. Jakarta
- Pattinama, M.J. 2008. Orang Bupolo dan Lingkungannya. PT. Citra Aji Parama. Yogyakarta.

- Huliselan, M. E. Rumahlewang, M. Isa Odar. 1988. Orang-Orang Bumi Lale dan Dunianya. Organisasi Sosial, Pertukaran dan Perubahan Sosial di Sentral Pulau Buru – Maluku Tengah (Indonesia). Laporan Penelitian. Ambon.
- Sumarjono Maria, 2009. Catatan untuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan dan Pengelolaan Hutan Adat, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Penerbit CV. Alfabeta, Bandung
- Suharjito, D., A. Khan, W.A. Djatmiko, M.T. Sirait, S. Evelyn. 2000. Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta : Aditya Media.
- Suharjito, D. 2014. Pengantar Metodologi Penelitian. IPB Press.